

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Hamzah, 2017, *Pemberantasan Hukum Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika.
- Bernard L, 2013, *Teori Hukum strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasii*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- BPKP, 1998, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional* , Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Cetakan I).
- D.Y. Witanto and A.P. Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim: Sebuah Instrument Menegakkan Keadilana Substantive Dalam Perkara Perkara Pidana* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- David H. Bayle, 2007, *Bunga Rampai Korupsi*, Jakarta: LP3ES, Jakarta.
- Dian Kartika Rahajeng, *Kupas Tuntas Kasus Fraud di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2025).
- Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.23.
- Evi Hartanti, 2023, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Farkhrani, evi Ariyani, 2016, *Hukum dan Wajah Hakim Dalam Dinamika Hukum Acara Peradilan*, Pustaka Itixam.
- Feri Tjahjono, 2015, "*Korupsi dan Kemiskinan*", Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Franz Magnis Suseno, 1999, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Moderen*, Jakarta: Gramedia.
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Rajagafindo Persada, 2011).
- Irwansyah, 2021 (Edisi Revisi), *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.

- Ismail, C. 2009, *Kapita Selekta Penegakan Hukum Tindak Pidana Tertentu edisi revisi*, Jakarta: PTIK press.
- Komariah Emong Sapardjaja, 2016, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel dalam Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Penerbit PT. Alumni.
- M. Busyro Muqoddas, 2011, *Dibalik Berita Jihat Melawan Mafia*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Marjan Miharja, 2020, *Korupsi, Integritas, & Hukum: Tantangan Regulasi Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Moh. Mahfud MD, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Rajawali Pers,.
- Muladi dan Barda Nawai Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. 2022, *Kembang Setaman Tindak Pidana Korupsi Indonesia dalam Teori, Norma, dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nitibaskara, R. R. 2018, *Kapita Selekta Sosiologi Kepolisian*, Jakarta: UM Jakarta Press.
- Wiyono R, 2008, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Risqi Perdana Putra, 2020, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Yogyakarta: Deepublish.
- Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Integratif Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rudi Pardede, 2017, *Proses pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sasongko Warsa, 2017, *Korupsi*, Yogyakarta: Relasi Inti Media.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta:Genta Publishing,2009).

-, dalam Yanto Supriyadi, Penerapan Hukum Progresif dalam Penegakkan di Tengah Krisis Demokrasi, Jurnal Hukum Vol. 17 No. 2 April 2010.
-, 2009, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Publishing, Yogyakarta.
-, 2020, *Hukum Progresif: Hukum Untuk Manusia*, Kompas, Jakarta.
- Soehino, 2011, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
-, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010).
- Sutoro, 2016, *Dana Desa Untuk Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputar Dana Desa)*. Jakarta: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Syed Husein Alatas, 1986, *Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, Jakarta: LP3S.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sabian Usman, 2016, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Teguh Sulistyawan dan Aria Zurnetti, 2011, *Hukum Pidana: Horizon Baru Pasca Reformasi*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Wijayanto dan Ridwan Zachri, 2013, *Korupsi Mengorupsi Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Wirjono Prodjodikoro, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco.
- Jurnal dan Tesis**
- “Anonim”, 2024, *Dana Desa: Berkah atau Bencana?*, Master Plan Desa, Edisi Tangga 26 Agustus.

- Abu Rahum, Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam pembangunan Fisik Desa Karyian Makmur Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser, (Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol.3 No.4, 2015).
- Afni Nuraida, Siti Ashira, 2021, *Kriminologi Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime), dan Kejahatan Terorganisir (Organized Crime)*, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, hlm.6.
- Akbari, A.R., Saputro, A.A., & Marbun, 2016, *memaknai dan mengukur disparitas: studi terhadap praktik pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi (Cetakan Pertama)*” Badan Penerbit FH UI-Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Chandra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo, 2014, *Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Malang: Jurnal Administrasi Publik.
- Coki R Ramadhan, 2023, *Teori Pilihan Rasional Untuk Memahami Koruptor di Indonesia*, Jurnal Anti Korupsi, Vol 09, No. 2.
- Dika Kurniawan, 2025, *Sociological Implications of Sentencing Disparities in Corruption Verdicts: A Case Study in Yogyakarta*, Saneskara: Journal of Social Studies, Vol. 2, No. 1.
- Dachran Busthaimi, 2017, *Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No. 4, Makassar.
- Firman Floranta Adonara, 2015, *Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, Jurnal Konstitusi Vol. 12 No. 2, Jember.
- Garda Fajar Panuluh, 2017, *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi terhadap Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun*.

- Harifin A Tumpa, 2015, *Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtschepping oleh Hakim dalam Memutus Perkara*, Jurnal Hasanuddin Law Review Vol. 1 No. 2, Jakarta.
- Klitgaard, & dkk. 2002, *Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia & Partnership for Governance in Indonesia.
- Max Weber, 1978, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, Berkeley: University of California Press.
- Muammar, Kurniawan, Fauzi, dkk, 2021, *Analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan kaitanya dengan Asas Kebebasan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Widya Pranata Hukum, 3(2).
- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik terhadap Tingkat Korupsi Pada Lembaga Peradilan Di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Orin Gusta Andini, *“menakar Pelevansi Pedoman Pemidanaan Koruptor Terhadap Upaya Pemberantasan Korupsi”* 5 No. 2 (2021); 133-148.
- Pasca Richardo, Hudi Yusuf, *Struktur Sosial dan Budaya Korupsi : Analisis Kriminologis terhadap Praktik Korupsi di Lembaga Pemerintahan*, Jurnal Intelek Insan cendekia, Vol 2 No.8, 2025
- Perilaku Permisif Masyarakat Terhadap Korupsi di Indonesia*, Jurnal Borneo Administrator, Volume 8 Nomor 3, 2012.
- Syarif Saddam Rivanie, 2019, *The Culture of Siri' (Shame) as a Corruption Prevention Instrument in Indonesia*, Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 383.
- Satyah Fausiah, 2014, *Evolusi Teori Fraud dan Relevansinya Terhadap Penyusunan dan Pelaksanaan Strategi Pencegahan Korupsi Dana Desa*, Ristansi : Riset Akuntansi, Volume 5, Nomor 1.
- Tim Visi Yustisia, 2016, *Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa*, Jakarta; Visi Media.

Toule, 2013, *Eksistensi Acaman Pidana Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Prioris, Vol 2 Nomor 2.

Tri Angga Sigit, 2020, "*Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: studi tingkat Kabupaten/Kota di Indonesia*", *Indonesian Treasury Review* Vol.5, No.2, 105-199.

Tyler, T. R., 2006, *Why People Obey the Law*, Princeton: Princeton University Press.

Fatkhurohman, Nalom Kurniawan, 2017, *Pergeseran Korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016*, Jurnal Konstitusi Volume 4 Nomor 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914) perubahana kedua atas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558).

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023.

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan

Putusan Nomor 27/PID.TPK/2022/PT MKS.

Putusan Nomor 28/ Pid. Sus-TPK/2022/PN MKS.

Putusan Nomor 103/Pid.Sus.TPK/2024/PN MKS

Website

Indoneian Corrupton Watch, Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023.

<https://www.antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Materi%20Pemapanan%20Laporan%20Pemantauan%20Tren%20Korupsi%20Tahun%202023%20.pdf>

Nasrandi, 2025, *Korupsi Dana Desa Meningkatkan: Kerugian Negara Capai Rp. 162 Miliar*, Mamuju: rri.co.id, 15 Januari 2025.

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2019, Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan ultasi Pengelolaan Keuangan Desa.